

## PENCAIRAN DANA BOS KINERJA DAN AFIRMASI PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEDAN

<sup>1</sup> Egla Margaretta Meliala, <sup>2</sup> Muhammad Heru Akhmadi

<sup>1,2</sup>KPPN Medan I dan SMAS ST. Ignasius Medan

[e.melialaa@gmail.com](mailto:e.melialaa@gmail.com)

Medan, 20131, Indonesia

### Abstract

Education is two of the four national aims specifically in order to advance general prosperity and to develop the nation's intellectual life. In the present time, the accessibility of education in remote areas, the building of characters, as well as the advances of technology has become challenges of education system due to lack of capabilities of skilled resources. In coping with those matters, the government allocates the Affirmation and Performance School Operational Assistance Funds in conjunction with the school's digitalization program to deal with 4.0 industrial revolution. This research is aimed at finding out the process of distribution of the Affirmation and Performance School Operational Assistance Funds in State Treasury Services Office I of Medan and the management implementation of the Performance School Operational Assistance Funds in St. Ignasius Medan High School. This research uses qualitative methods by using the ATLAS.ti application tools to create network knowledge. The research findings show that the distribution and management of the Affirmation and Performance School Operational Assistance Funds has been progressing well despite having some issues. Some of the issues are the invalid school account data and the changing of School Operational Assistance Funds regulations. Those issues resulted in the high return of accounts and the difficulty in formulating financial reporting of the Performance School Operational Assistance Funds.

**Keywords:** Affirmation and Performance; Education; Funds Distribution; School Operational Assistance Funds

### Abstrak

Pendidikan merupakan dua dari empat tujuan bernegara yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada saat ini, akses pendidikan di daerah Terpencil; Terjauh dan Terluar (3T), pendidikan karakter, dan kemajuan teknologi menjadi tantangan dalam dunia pendidikan karena tidak diimbangi dengan keahlian dan kemampuan sumber daya manusia. Untuk menghadapi hal tersebut, pemerintah mengalokasikan Dana BOS Afirmasi dan Kinerja dalam rangka Program Digitalisasi Sekolah menghadapi era revolusi industri 4.0. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pencairan Dana BOS Kinerja dan Afirmasi di KPPN Medan I dan penerapan pengelolaan Dana BOS Kinerja di sekolah SMAS ST. Ignasius Medan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan tools aplikasi ATLAS.ti yang menghasilkan network knowledge. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencairan dan pengelolaan Dana BOS Kinerja dan Afirmasi sudah berjalan dengan baik meskipun mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Beberapa kendala tersebut data rekening sekolah yang tidak valid dan peraturan dana BOS yang berubah. Akibat dari kendala tersebut menyebabkan tingginya retur rekening dan kesulitan menyusun pelaporan keuangan Dana BOS dan Kinerja.

**Kata Kunci:** Afirmasi dan Kinerja; Dana BOS; Pencairan Dana; Pendidikan

## PENDAHULUAN

Dua dari empat tujuan bernegara adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan-tujuan tersebut dapat tercapai salah satunya melalui pendidikan. Pendidikan adalah usaha untuk mewujudkan proses pembelajaran agar peserta didik mampu mengembangkan potensi diri secara aktif baik untuk memperoleh beberapa kemampuan seperti spiritual, akhlak mulia, kecerdasan, pengendalian diri, dan sebagainya (Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003). Setiap orang berhak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk membangun bangsa dan negaranya serta wajib mengikuti pendidikan dasar yang diselenggarakan dan dibiayai oleh pemerintah.

Pendidikan menjadi salah satu prioritas negara. Berdasarkan teori *New Public Management* (NPM) yang menjelaskan bagaimana sektor publik diatur dalam menyediakan pelayanan publik kepada masyarakat, terbatasnya sumber daya keuangan yang dimiliki oleh pemerintah memacu penentuan dan pemberian layanan publik yang ditujukan kepada masyarakat berdasarkan sifat barang tersebut dan/atau tingkat prioritasnya (Jane, 1967). Oleh sebab itu, Pemerintah memegang peranan penting agar situasi dan kondisi penyelenggaraan serta pengelolaan pendidikan yang demokratis dan berkeadilan dapat tercipta (Ferdi, 2013).

Peranan tersebut terwujud dalam anggaran belanja pendidikan yang bersifat *mandatory spending* yakni belanja atau pengeluaran negara yang besarnya sudah ditentukan oleh undang-undang (Armida, 2012). Adapun tujuan *mandatory spending* adalah untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi di daerah. Dalam hal ini, anggaran pendidikan diprioritaskan sekurang-kurangnya 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Salah satu upaya pemerintah dalam membiayai pendidikan dasar bagi rakyat adalah melalui Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS). Dana BOS adalah dana yang dipakai untuk membiayai belanja nonpersonalia serta beberapa kegiatan lain suatu satuan pendidikan dasar dan/atau menengah sebagai pelaksana program wajib belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (PMK No. 9/PMK.07/2020). Amiini (2016) juga menyatakan bahwa Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan program oleh pemerintah yang dilaksanakan dalam rangka pendistribusian pendanaan biaya non-operasional bagi sekolah sebagai pengemban program wajib belajar. Penggunaan Dana BOS dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip, yaitu fleksibilitas, efektifitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi. Fleksibilitas, yaitu penggunaan dana BOS dikelola sesuai dengan kebutuhan sekolah. Efektifitas jika

penggunaan dana BOS berhasil memberikan pengaruh dan nilai guna yang diinginkan untuk mencapai tujuan pendidikan sekolah (Womsiwor, 2020). Efisiensi, yaitu dengan menggunakan dana BOS berarti berkomitmen dalam meningkatkan kualitas pembelajaran siswa dengan menggunakan biaya rendah namun hasilnya memiliki kualitas yang baik (Lubis, 2017). Akuntabilitas, yaitu penggunaan dana BOS dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan sesuai dengan peraturan perundangundangan dan masyarakat memiliki kebebasan dalam mengakses atau memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan (Lubis, 2017). Adapun tujuan pemerintah menyalurkan dana BOS adalah untuk menciptakan layanan pendidikan yang bermutu dan dapat menjangkau semua lapisan masyarakat dalam rangka melaksanakan program wajib belajar. John dan Morphet (1975) dalam Arwildayanto dkk. (2017) mengklasifikasikan pengalokasian pembiayaan pendidikan yang berasal dari pemerintah pusat menjadi dua bentuk model, yaitu model *flat grant* dan model *power equalization*.

Program Dana BOS menerapkan *flat grant model* yang merupakan bantuan Pemerintah dalam bentuk uang yang dibagikan kepada sekolah berdasarkan jumlah siswa yang harus dididik di daerah tanpa mempertimbangkan kemampuan daerah tersebut dalam membayar pajak (Kadir, 2011). Model *flat grant* memperlihatkan bahwa penyaluran anggaran pendidikan bagi seluruh daerah adalah sama dan merata tanpa melihat ketimpangan limpahan sumber daya yang dimiliki oleh daerah kaya dengan sumber daya daerah yang kurang mendukung. Monita (2019) menyatakan bahwa melalui pembiayaan pendidikan dengan jenis ini, pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dapat terlaksana secara efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan potensi sumber daya manusia.

Dewasa ini, akses pendidikan di daerah 3T, pendidikan karakter, dan kemajuan teknologi masih menjadi *concern* dalam dunia pendidikan bagi bangsa Indonesia karena belum diimbangi dengan keahlian dan kemampuan. Oleh sebab itu, dalam rangka menyiapkan sekolah memasuki era revolusi industri 4.0, Pemerintah mengalokasikan dana untuk program Digitalisasi Sekolah melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yakni Dana BOS Kinerja dan Afirmasi. Dana BOS Kinerja merupakan program Pemerintah Pusat yang disediakan bagi sekolah dasar dan menengah yang dinilai memiliki kinerja tinggi dalam melaksanakan penyelenggaraan layanan pendidikan di Daerah Khusus yang ditetapkan oleh Kemendikbud.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 24 Tahun 2020, Dana BOS Afirmasi adalah program Pemerintah Pusat yang didistribusikan kepada sekolah dasar dan menengah yang berada di daerah dengan kriteria dan syarat tertentu (Daerah Khusus) yang ditetapkan oleh Kemendikbud. Daerah Khusus yang dimaksud dalam pengertian tersebut adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil,

daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.

Pemerintah akan meluncurkan Dana BOS Afirmasi sebesar Rp2,85 triliun bagi 30.227 sekolah untuk menunjang pembiayaan kegiatan operasional rutin sekolah serta menunaikan percepatan pembelajaran untuk sekolah yang berada di daerah tertinggal dan sangat tertinggal. Pemerintah juga menyiapkan Dana BOS Kinerja yang direncanakan untuk didistribusikan kepada sekolah yang diukur memiliki kinerja baik dalam menyelenggarakan layanan pendidikan dengan penyediaan dana sebesar Rp1,50 triliun kepada 6.004 sekolah. Sekolah yang telah ditetapkan sebagai penerima Dana BOS Afirmasi dan Dana BOS Kinerja mendapatkan dana sebesar Rp60.000.000.

Pada tahun 2020, KPPN Medan I berperan selaku penyalur Dana BOS Kinerja dan Afirmasi untuk pertama kalinya, begitu pula dengan SMAS ST. Ignasius yang memperoleh dan mengelola Dana BOS Kinerja untuk pertama kali. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah digambarkan sebelumnya, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: 1) bagaimana proses pencairan dana BOS Kinerja dan Afirmasi pada KPPN Medan I? 2) bagaimana pengelolaan Dana BOS Kinerja di sekolah SMA ST. Ignasius Medan dan dampaknya bagi pelayanan sekolah? 3) Apa saja yang menjadi kendala dalam pencairan dana BOS Kinerja dan Afirmasi TA 2020 di KPPN Medan I dan di SMA ST. Ignasius Medan?

Mengacu pada beberapa permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: menjelaskan proses pencairan dan penyaluran dana BOS Kinerja dan Afirmasi di KPPN Medan dan mengidentifikasi kendala yang terjadi dalam proses pencairan dan pengelolaan dana BOS Kinerja dan Afirmasi.

## METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menjelaskan suatu fenomena secara detail atas data yang telah dikumpulkan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan studi lapangan secara triangulasi yang menggabungkan observasi, wawancara, dan dokumentasi (Sugiyono, 2017). Penentuan responden wawancara dilakukan secara purposif, yakni memilih responden yang dianggap ahli dalam memahami permasalahan terkait pencairan Dana BOS Kinerja dan Afirmasi. Penelitian ini dilakukan pada KPPN Medan I dan SMAS ST. Ignasius Medan. Data primer berupa verbatim hasil wawancara yang telah diperoleh akan dianalisis menggunakan aplikasi ATLAS.ti sehingga dapat disajikan berupa penarikan kesimpulan melalui diagram jaringan (*network view*).

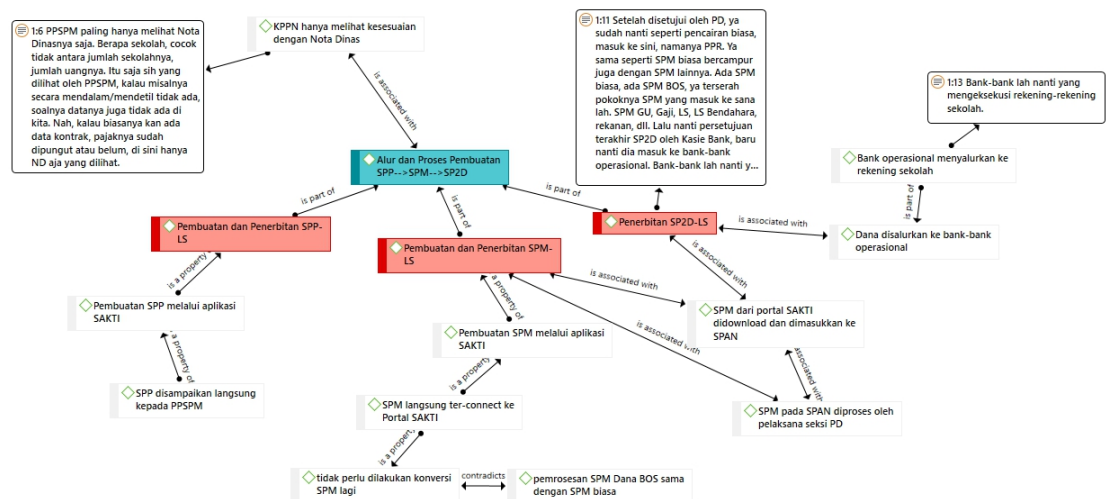


dilaksanakan KPPN Medan I adalah menerbitkan SPP, SPM, dan SP2D-LS untuk menyalurkan Dana BOS Kinerja dan Afiriasi ke rekening sekolah penerima. Hasil analisis atas informasi yang diberikan oleh narasumber dimuat dalam diagram jaringan pada Gambar 2 yang akan memperlihatkan alur penerbitan dokumen-dokumen tersebut.

Setelah data sekolah masuk ke dalam sistem OM-SPAN, Nota Dinas pelaksanaan pencairan Dana BOS Kinerja dan Afiriasi dari Direktorat Dana Transfer Khusus terbit pada tanggal 24 Agustus 2020 dengan nomor ND-540/PK.3/2020. Selanjutnya, KPPN Medan I melakukan verifikasi data dan pengujian kesesuaian Surat Keputusan dan Permintaan Distribusi yang telah disampaikan kepada KPPN Medan I. Jika data dinyatakan sesuai, KPPN Medan I selaku satker bendahara umum negara melakukan penerbitan SPP-LS pada 26 Agustus 2020.

Pembuatan SPP ini dilakukan oleh staf pelaksana pada seksi bank. Pembuatan SPP tersebut dilaksanakan menggunakan aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dengan jenis dokumen pembayaran 273 (LS Banyak Penerima). SPP-LS untuk penyaluran Dana BOS Kinerja dan Afiriasi yang sudah diterbitkan akan disampaikan kepada PPSPM, dalam hal ini Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN Medan I untuk diperiksa dengan melampirkan beberapa dokumen pendukung seperti Surat Keputusan; Surat Rekomendasi Provinsi Sumatera Utara; dan Nota Dinas yang berisikan jumlah sekolah penerima dan nominal penyaluran.

**Gambar 2.** Network Alur Pencairan Dana BOS Afkin pada KPPN Medan I



Sumber: Diolah menggunakan aplikasi Atlas.ti

PPSPM bertanggungjawab dalam melakukan pemeriksaan kebenaran, kelengkapan, dan keabsahan administrasi atas SPP dan dokumen pendukung yang telah disampaikan. Apabila hasil pengujian SPP dan kelengkapan dokumen dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dibayarkan, dapat dilakukan tahap selanjutnya yaitu penerbitan SPM. Pada tanggal



yang sama, yakni 26 Agustus 2020, PPSPM melakukan pembebanan tagihan pada mata anggaran yang disediakan dan menerbitkan SPM melalui aplikasi SAKTI. PPSPM juga berkewajiban untuk menandatangani SPM dan memasukkan PIN PPSPM dalam ADK SPM. ADK SPM yang telah terbit akan terkoneksi langsung ke bagian pencairan dana melalui Portal SAKTI sehingga SPM tidak perlu dikonversi terlebih dahulu.

Hal inilah yang membedakan pemrosesan SPM untuk penyaluran Dana BOS dengan SPM dalam rangka pembebanan mata anggaran secara umum oleh satker. Setelah mengunduh ADK SPM dari Portal SAKTI, staf pelaksana pencairan dana mengunggah data SPM ke dalam aplikasi SPAN untuk selanjutnya dilakukan pengujian SPM. Pengujian yang dilakukan yaitu dengan melihat kesesuaian SPM dengan tayangan resume tagihan pada aplikasi SPAN dan kesesuaian jumlah tagihan yang tertera dalam SPM. Jika SPM yang telah diperiksa dan diuji dinyatakan sesuai, pelaksana bagian pencairan dana meneruskan tagihan pada aplikasi SPAN kepada Kepala Seksi Pencairan Dana. Kepala Seksi Pencairan Dana melakukan review resume tagihan dengan peraturan yang berlaku.

Apabila hasil review resume tagihan telah sesuai, Kepala Seksi Pencairan Dana memberikan persetujuan tagihan. Selanjutnya, pelaksana bagian pencairan dana membuat permintaan proses pembayaran (*payment process request/PPR*) dan menyampaikan daftar tagihan yang telah disetujui kepada Kepala Seksi Bank. Kepala Seksi Bank akan melakukan penerbitan SP2D melalui aplikasi SPAN dengan menyetujui PPR. SP2D untuk penyaluran Dana BOS Kinerja dan Afiriasi terbit pada tanggal 26 Agustus 2020. Berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan, pelaksana bagian bank akan melakukan pembayaran dengan mentransfer dana dari Rekening Kas Negara ke bank operasional yang ditetapkan menggunakan aplikasi SPAN. Selanjutnya, bank operasional menyalurkan Dana BOS Kinerja dan Afiriasi ke rekening-rekening sekolah. SPP, SPM, dan SP2D dalam rangka pencairan Dana BOS Kinerja dan Afiriasi yang diterbitkan oleh KPPN Medan I dapat dilihat dalam Tabel 1.

**Tabel 1.** SPP, SPM, dan SP2D Pencairan Dana BOS Afiriasi dan Kinerja KPPN Medan I

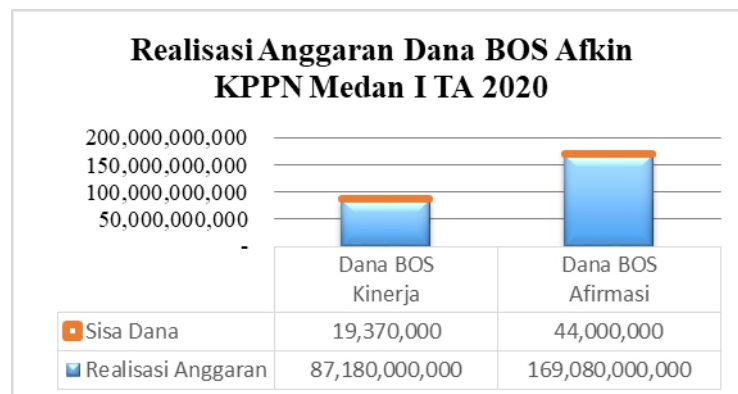
No. SPP	No. SPM	No. SP2D	Tanggal	Nominal Penyaluran (Rp)
00045T	00045A	200041304007418	26/08/2020	5.640.000.000,00
00046T	00046A	200041303002915	26/08/2020	5.940.000.000,00
00047T	00047A	200041302004829	26/08/2020	3.300.000.000,00
00048T	00048A	200041301002718	26/08/2020	72.300.000.000,00
<b>Total Penyaluran Dana BOS Kinerja</b>				<b>87.180.000.000,00</b>
00045T	00045A	200041304007418	26/08/2020	1.380.000.000,00
00046T	00046A	200041303002915	26/08/2020	6.660.000.000,00
00047T	00047A	200041302004829	26/08/2020	144.960.000.000,00
00048T	00048A	200041301002718	26/08/2020	16.080.000.000,00
<b>Total Penyaluran Dana BOS Afiriasi</b>				<b>169.080.000.000,00</b>

Sumber: Diolah dari aplikasi OM SPAN

Pada tahun anggaran 2020, KPPN Medan I telah berhasil merealisasikan distribusi anggaran Dana BOS Kinerja mencapai 99,99% dari total pagu yang dianggarkan dengan nominal penyaluran sejumlah Rp87.180.000.000. Dana BOS Kinerja Provinsi Sumatera Utara disalurkan kepada 1.453 sekolah dengan jumlah siswa sebanyak 232.402. Dana BOS Afirmasi juga telah disalurkan oleh KPPN Medan I sebesar Rp169.080.000.000 dengan persentase mencapai 99,97%.

Dana BOS Afirmasi didistribusikan oleh KPPN Medan I kepada 2.818 sekolah dengan total siswa sebanyak 336.045 melalui lima jenis rekening. Meskipun penyaluran Dana BOS Kinerja yang dilakukan KPPN Medan I sangat tinggi, namun masih terdapat sisa Dana BOS Kinerja sejumlah Rp19.370.000,00 dan sisa Dana BOS Afirmasi sebesar Rp44.000.000,00 yang tidak dapat tersalur ke rekening sekolah. Realisasi Anggaran Dana BOS Kinerja dan Afirmasi yang dilaksanakan oleh KPPN Medan I direpresentasikan dalam Gambar 3.

**Gambar 3.** Realisasi Anggaran Dana BOS Afkin KPPN Medan I



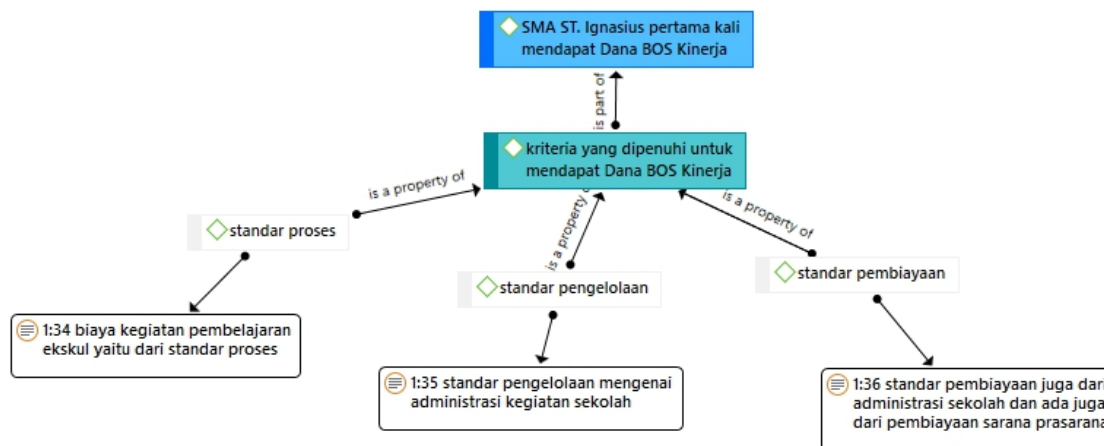
Sumber: Diolah dari aplikasi OM-SPAN

Pelaksanaan pencairan Dana BOS Kinerja dan Afirmasi pada KPPN Medan I sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut tercermin dari kesesuaian tahapan dan waktu pelaksanaan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Skema penyaluran terbaru ini juga dikatakan efektif karena dampaknya lebih cepat dirasakan oleh sekolah.

### Pengelolaan Dana BOS Kinerja pada SMA ST. Ignasius Medan

Tahun 2020 menjadi tahun pertama SMA ST. Ignasius Medan menerima Dana BOS Kinerja. Berdasarkan analisis dari diagram jaringan di atas, diperoleh informasi bahwa sekolah memenuhi tiga kriteria standar, yaitu standar proses yang berasal dari kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler, standar pengelolaan yang berasal dari administrasi kegiatan sekolah, dan standar pembiayaan yang berasal dari administrasi sekolah dan pembiayaan sarana-prasarana.



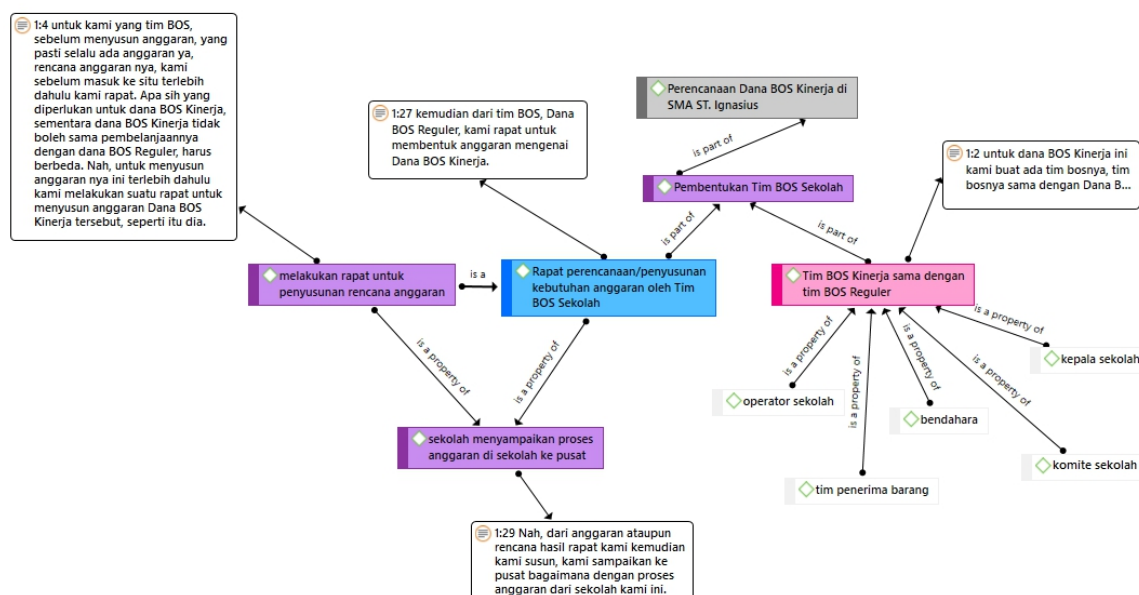
**Gambar 4.** Network Pemenuhan Kriteria Penerima Dana BOS Kinerja

Sumber: Diolah menggunakan aplikasi Atlas.ti

Pengelolaan Dana BOS Kinerja yang dilakukan oleh SMA ST. Ignasius terbagi ke dalam tiga tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan/penggunaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban.

### 1. Tahap Perencanaan Dana BOS Kinerja di SMA ST. Ignasius Medan

Berikut ini merupakan diagram jaringan atas hasil analisis berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama narasumber. Diagram jaringan dalam Gambar 5 menjabarkan pelaksanaan perencanaan Dana BOS Kinerja dan Afirmasi pada SMA ST. Ignasius Medan.

**Gambar 5.** Network Perencanaan Dana BOS Kinerja

Sumber: Diolah menggunakan aplikasi Atlas.ti

Berdasarkan *network knowledge* dalam Gambar 5, perencanaan Dana BOS Kinerja di SMA ST. Ignasius dilaksanakan dengan melakukan penyusunan kebutuhan anggaran yakni

rencana kerja anggaran sekolah (RKAS). RKAS merupakan dokumen yang disusun untuk melihat rencana program sekolah dalam satu tahun anggaran yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara harapan dan realisasi.

Sekolah harus memperhatikan penyusunan RKAS agar tidak terjadi kekeliruan atas kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan setahun ke depan. Dalam menyusun rencana anggaran, SMA ST. Ignasius menyelenggarakan rapat yang dihadiri oleh Tim BOS Sekolah setiap awal tahun. Tim BOS Sekolah dalam rangka pengelolaan Dana BOS Kinerja sama dengan Tim BOS Reguler, yakni terdiri dari kepala sekolah, bendahara, komite sekolah, operator, dan tim penerima barang. Penyusunan RKAS dilakukan menggunakan Aplikasi RKAS (ARKAS) dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan sekolah.

RKAS merinci pengeluaran/belanja berdasarkan kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam hal ini, biaya yang dianggarkan tidak boleh sama peruntukkannya dengan biaya yang sudah dialokasikan untuk Dana BOS Reguler. Setelah melakukan penyusunan RKAS, sekolah menyampaikan dokumen tersebut berikut penjelasan proses anggaran yang dilakukan oleh sekolah untuk tahun anggaran berkenaan kepada Kemendikbud untuk kemudian diproses dalam rangka penyaluran Dana BOS Kinerja dan Afirmasi kepada seluruh sekolah penerima di seluruh Indonesia.

## **2. Tahap Pelaksanaan Dana BOS Kinerja di SMA ST. Ignasius Medan**

Pelaksanaan Dana BOS Kinerja pada SMA ST. Ignasius mencakup beberapa kegiatan, yakni penyaluran dan pengambilan dana, penggunaan dan pembelanjaan dana, pengelolaan perpajakan, serta pengelolaan sisa dana.

### **A. Penyaluran dan Pengambilan Dana BOS Kinerja**

Penyaluran dan pengambilan Dana BOS Kinerja oleh SMA ST. Ignasius sesuai dengan petunjuk teknis Dana BOS Kinerja dan Afirmasi tahun 2020, dalam hal ini SMA ST. Ignasius menerima distribusi dana BOS Kinerja secara sekaligus (satu tahap) setelah dilakukan penyaluran ke rekening sekolah oleh KPPN Medan I. Jumlah dana yang diterima sekolah juga sesuai dengan peraturan yang berlaku, yakni sebesar Rp60.000.000. Berdasarkan rekening koran SMA ST. Ignasius, dana tersebut masuk ke rekening sekolah pada bulan Agustus. Pada bulan yang sama, Bendahara BOS melakukan pengambilan dana BOS Kinerja ke bank penyalur yaitu Bank Negara Indonesia.

### **B. Pembelanjaan dan Penggunaan Dana BOS Kinerja**

Tim BOS Sekolah SMA ST. Ignasius melakukan pembelanjaan Dana BOS Kinerja berdasarkan RKAS yang telah disusun dalam tahap perencanaan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, dapat diperoleh informasi bahwa Dana BOS Kinerja yang diterima oleh sekolah digunakan untuk membeli tambahan fasilitas yang mendukung kegiatan belajar-mengajar berupa lemari, kipas angin, tangga aluminium, dan

tablet. Dalam rangkaian proses pembelanjaan, sekolah melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa. Kegiatan PBJ tersebut dilakukan secara daring melalui Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah).

Proses pengadaan dari sisi penyedia melalui SIPLah terdiri atas empat tahapan, yakni penawaran, konfirmasi, pengiriman, dan pencairan. Tahapan pengadaan yang dilakukan oleh sekolah juga terdiri atas empat tahap, yaitu pencairan, pesanan, penerimaan, dan pembayaran. Pembelanjaan atas Dana BOS Kinerja dilakukan pada bulan Oktober 2020. Adapun pembelanjaan Dana BOS Kinerja yang dilaksanakan oleh SMA ST. Ignasius Medan tercantum dalam Tabel 2.

**Tabel 2.** Penggunaan Dana BOS Kinerja SMAS ST. Ignasius Tahun 2020

Pembelanjaan	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
Lemari	9 buah	1.100.000,00	9.900.000,00
Kipas Angin	4 buah	900.000,00	3.600.000,00
Tangga aluminium	1 buah	1.070.082,00	1.070.082,00
Tablet zinetex	20 buah	2.064.997,00	41.299.940,00
<b>Sisa saldo Dana BOS Kinerja</b>			<b>55.870.022</b>

*Sumber: Diolah dari aplikasi OM SPAN*

Penggunaan Dana BOS Kinerja yang dilaksanakan oleh sekolah dapat dikatakan berjalan dengan baik karena dijalankan sesuai prinsip-prinsip penggunaan dana BOS dan realisasi pembelanjaannya sudah sesuai dengan rencana anggaran yang telah disusun. Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh Bendahara sekolah, yaitu:

*"Kalau saya secara pribadi, Dana BOS Kinerja yang kami lakukan sudah sesuai dengan yang kami anggarakan, sudah sesuai dengan realisasinya."*

### C. Pengelolaan Perpajakan Dana BOS Kinerja

Bendahara sekolah yang diberikan amanah sebagai Bendahara BOS wajib menjalankan kewajiban perpajakan atas penggunaan Dana BOS yang dilakukan oleh sekolah. Sesuai dengan SE-02/PJ/2006, terdapat sedikit perbedaan terkait perpajakan pada sekolah negeri dan swasta. Bendaharawan sekolah swasta bukan merupakan bendaharawan instansi pemerintah sehingga tidak perlu melakukan pemungutan PPN dan PPh Pasal 22.

Berdasarkan hal tersebut, pemotongan atau pemungutan pajak yang menjadi kewenangan bendahara sekolah swasta hanyalah PPh Pasal 21 atas gaji; honor pegawai; dan penghasilan selain gaji kepada bukan pegawai, PPh Pasal 23 atas belanja jasa atau sewa, PPh Pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah/bangunan; hadiah; dan jasa konstruksi, dan Bea Materai. Sebelum melakukan kewajiban perpajakan, bendahara sekolah harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Bendahara sekolah swasta dapat menggunakan NPWP sekolah atau yayasan sekolah untuk memudahkan proses administrasi.

Dalam melakukan pengelolaan Dana BOS Kinerja, SMA ST. Ignasius sebagai satuan pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat tidak memiliki kewajiban dalam melakukan

pemotongan dan pemungutan PPN dan PPh Pasal 22 atas barang-barang yang dibeli melalui SIPLah karena pembayaran tersebut akan dilakukan oleh pihak rekanan.

#### **D. Pengelolaan Sisa Dana BOS Kinerja**

Dalam melaksanakan pengelolaan Dana BOS Kinerja tahun anggaran 2020, terdapat sisa saldo dana yang disebabkan oleh perbedaan harga tablet yang tertera dalam aplikasi SIPLah dengan daftar harga pembelian awal yang diberikan oleh penyedia kepada sekolah. Harga yang termuat dalam aplikasi SIPLah lebih murah sehingga realisasi anggaran yang sudah dialokasikan menjadi berlebih dan menimbulkan sisa saldo. Saldo sisa yang dimiliki sekolah berjumlah Rp4.129.978. Sisa saldo tersebut saat ini masih disimpan oleh sekolah dan berada di rekening sekolah.

Sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku, sisa saldo yang dimiliki sekolah dapat digunakan untuk kegiatan di tahun bersangkutan atau di tahun anggaran berikutnya yang mengacu pada petunjuk teknis pengelolaan Dana BOS Kinerja dan Afirmasi. Pernyataan tersebut diperoleh dari hasil wawancara oleh Bendahara sekolah, yakni:

*"Untuk Dana BOS Kinerja, dari sekolah kami ada saldo sisa, ... pada saat pembelian tablet mereka memberikan daftar pembelian, otomatis kami membuat anggaran sesuai dengan harga yang mereka buat. Ternyata setelah masuk SIPLah, harga yang mereka beri dalam daftar lebih murah di SIPLah ... kalau untuk sekarang masih dipegang oleh sekolah."*

### **3. Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana BOS Kinerja di SMA ST. Ignasius Medan**

#### **A. Pembukuan Dana BOS Kinerja**

Sekolah harus menyusun pembukuan secara lengkap dan menguraikan secara rinci pembukuan apa saja yang harus dilakukan oleh sekolah. Pembukuan atas transaksi penggunaan Dana BOS merupakan suatu hal yang sangat penting karena dapat menjadi sumber informasi bagi sekolah dalam melakukan pertanggungjawaban kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Kemendikbud. Pembukuan dalam rangka pengelolaan Dana BOS Kinerja dilakukan menggunakan aplikasi LPJ BOS 2020. SMA ST. Ignasius melakukan pembukuan pada bulan November 2020. Adapun pembukuan yang disusun oleh sekolah adalah RKAS, buku kas umum, buku pembantu kas, dan buku pembantu bank.

#### **B. Pelaporan Dana BOS Kinerja**

Selain melakukan pembukuan, sekolah juga diwajibkan menyusun rekapitulasi realisasi penggunaan Dana BOS Kinerja yang telah dilaksanakan sekolah selama satu tahun anggaran. Penyusunan laporan ini dilakukan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Realisasi Untuk Laporan Penggunaan Dana BOS (SIRUP BOS 2020). SIRUP BOS merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Tim Manajemen BOS Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan sekolah di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Utara dalam melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS.

Selain itu, aplikasi ini juga memudahkan Dinas Pendidikan dalam mengumpulkan laporan sekolah sehingga proses rekapitulasi laporan sekolah menjadi lebih cepat. Laporan yang telah disusun kemudian ditandatangani oleh bendahara BOS, kepala sekolah, dan komite sekolah. Selain mengisi laporan pada aplikasi SIRUP BOS, sekolah juga melakukan pengisian laporan secara *online* pada laman kemendikbud [bos.kemendikbud.go.id](http://bos.kemendikbud.go.id). Pelaporan secara daring dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas penggunaan Dana BOS.

### C. Publikasi Dana BOS Kinerja

Petunjuk teknis pengelolaan Dana BOS tahun 2020 juga mengamanatkan sekolah untuk melakukan publikasi atas laporan realisasi Dana BOS Kinerja yang telah disusun dan ditandatangani terkait penggunaan Dana BOS Kinerja kepada masyarakat secara terbuka. Publikasi dilakukan untuk meningkatkan transparansi pengelolaan Dana BOS Kinerja. Penulis tidak mendapatkan informasi mengenai publikasi yang dilakukan oleh SMA ST. Ignasius Medan atas realisasi penggunaan Dana BOS Kinerja.

Tambahan sumber daya keuangan yang dapat digunakan untuk membantu mendanai kegiatan pembelajaran tentunya memiliki dampak baik bagi sekolah. Keberadaan Dana BOS Kinerja yang diterima oleh SMA ST. Ignasius Medan memberikan dampak positif kepada sekolah. Sarana prasarana yang sebelumnya tidak dimiliki sekolah seperti lemari penyimpanan, kipas angin, dan tangga aluminum yang berfungsi menunjang fasilitas dalam rangka pengelolaan dan pemeliharaan sekolah dapat dibeli dengan menggunakan Dana BOS Kinerja. Selain itu, pembelian alat multimedia yakni tablet juga sangat membantu para guru dan murid dalam menunjang proses belajar mengajar, terlebih di saat pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh bendahara sekolah, yakni:

*"Kalau dampak baik pasti jelas ada, karena untuk dana BOS Reguler saja itu kan kurang ... akhirnya ada anggaran yang bisa kami pakai untuk membeli yang lain karena sebelumnya terbengkalai karena kekurangan dana. Dana BOS Kinerja otomatis untuk meningkatkan pelayanan pendidikan, karena untuk mendapatkan Dana BOS Kinerja ini melihat peningkatan yang ada di sekolah ... jadi cara kami mengajar sudah lebih baik dari sebelumnya, terlebih setelah pandemi COVID-19 pertama sekali."*

## 4. Permasalahan yang Dihadapi Dalam Pencairan dan Pengelolaan Dana BOS

### A. Permasalahan yang Dihadapi KPPN Medan I

Dalam melaksanakan penyaluran Dana BOS Kinerja dan Afirmasi tahun anggaran 2020, KPPN Medan I juga tetap menghadapi beberapa permasalahan. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pelaksana seksi bank yang khusus menangani penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, kendala yang dihadapi adalah perbedaan nama dan/atau nomor rekening sekolah penerima. Jika sekolah mengganti nama atau nomor rekening sekolah, pada saat pembuatan SPP, seksi bank harus melakukan *import supplier* terlebih

dahulu di SPAN.

Hal tersebut memakan waktu cukup lama karena tidak hanya terjadi pada satu atau dua sekolah saja namun ratusan sekolah. Kendala tersebut juga dihadapi saat sekolah baru menjadi penerima Dana BOS. Data *supplier* sekolah tersebut sudah tersedia di SPAN karena telah diinterkoneksi oleh pusat namun, belum tersedia pada aplikasi SAKTI sehingga ketika akan membuat SPP, harus dilakukan penarikan *supplier* dari aplikasi SPAN ke aplikasi SAKTI terlebih dahulu. Berikut ini merupakan pernyataan yang diberikan oleh narasumber.

*"Kendalanya yang pertama waktu membuat SPP, misalnya ada sekolah yang rekeningnya baru. Nah, otomatis ketika membuat SPP, butuh import supplier dulu dari SPAN, itu butuh waktu. Kalau misalnya cuma satu sekolah saja bisa cepat, tetapi ada sampai ratusan sekolah ... atau karena memang sekolahnya yang baru, di SAKTI data supplier-nya belum ada, tetapi di SPAN sudah ada ketika membuat SPP itu harus menarik supplier yang baru tadi dari SPAN untuk masuk ke SAKTI."*

Selain itu, kendala lainnya yang dihadapi KPPN Medan I dalam melakukan penyaluran Dana BOS adalah tingginya jumlah retur SP2D. Pada tahun 2020, terdapat 162 rekening sekolah yang mengalami retur. Retur SP2D Dana BOS dapat dilihat pada menu Modul Bank dalam aplikasi OM-SPAN dengan memasukkan kode satker 403576. Retur atas penyaluran Dana BOS berdasarkan jenis Dana BOS dirinci dalam Tabel 3.

**Tabel 3.** Retur Berdasarkan Jenis Dana BOS

Jenis Dana BOS	Jumlah rekening retur	Jumlah
Reguler	140	Rp8.265.653.000,00
Afirmasi	16	Rp960.000.000,00
Kinerja	6	Rp360.000.000,00
<b>Total</b>	<b>162</b>	<b>Rp9.585.653.000,00</b>

*Sumber: Diolah dari aplikasi OM-SPAN*

Retur yang terjadi dapat disebabkan oleh beberapa hal. Dalam aplikasi OM-SPAN, keterangan retur terdiri atas "Account Cr is closed", "Account Cr Not Found", "Destination account not found, Funds has been transferred to the RETUR account (296474245), Journal:915775", "Invalid Account Number#", "Rekening Sudah Ditutup", dan "Rekening Supplier Tidak Aktif/Salah/Tidak Ditemukan". Keterangan terjadinya retur tersebut dirangkum dalam Tabel 4.

**Tabel 4.** Rekapitulasi Penyebab Retur

Keterangan retur	Jumlah rekening
Rekening sudah ditutup	6
Rekening <i>supplier</i> tidak aktif/salah/tidak ditemukan	156
<b>Total</b>	<b>162</b>

*Sumber: Diolah dari aplikasi OM-SPAN*



KPPN Medan I melakukan penyelesaian retur terkait penyaluran Dana BOS dengan menyampaikan surat pemberitahuan terjadinya retur berikut daftar sekolah yang mengalami retur kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

- a. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan pemberitahuan tersebut kepada sekolah-sekolah yang mengalami retur.
- b. Sekolah memperbaiki data rekening yang salah dan meng-update pembaharuan rekening pada aplikasi Dana BOS. Jika telah dilaksanakan, sekolah menyampaikan pemberitahuan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.
- c. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan surat balasan beserta data rekening yang telah diperbaiki oleh sekolah kepada KPPN Medan I.
- d. KPPN Medan I melakukan pengecekan perbaikan data. Jika sesuai dan benar, KPPN Medan I memproses ulang penyaluran atas retur tersebut dengan menerbitkan SPP dan SPM kembali.

Meskipun penyelesaian retur telah dilakukan, tidak menutup kemungkinan terjadi retur untuk kedua kalinya. Retur kedua kali terjadi karena masih terdapat kesalahan pada data rekening sekolah yang telah diperbaiki saat retur pertama terjadi sehingga ketika dana sudah disalurkan ke bank terjadi penolakan. Monitoring atas retur kedua dapat dilakukan dengan cara yang sama dengan retur pertama yakni pada menu Modul Bank dalam aplikasi OM-SPAN, namun kode satker yang dimasukkan adalah 999012. Retur kedua berjumlah 44 rekening dengan uraian sudah diproses sebanyak 40 retur sedangkan 4 retur lainnya belum diproses. Retur yang berulang kali terjadi mengindikasikan tingginya kelalaian sekolah dalam melakukan *input* data rekening sekolah.

KPPN Medan I terus berupaya mencari solusi untuk menekan tingginya retur yang disebabkan oleh kesalahan sekolah. Gambar 11 merupakan diagram yang diolah dari hasil wawancara dengan narasumber untuk menunjukkan salah satu upaya yang dilakukan oleh KPPN Medan I dalam menekan tingginya retur SP2D dalam rangka pendistribusian Dana BOS Kinerja dan Afirmasi.

Salah satu cara yang diambil oleh KPPN Medan I adalah dengan mengundang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara untuk membahas kendala yang mungkin dihadapi sekolah dengan skema penyaluran yang baru ini. Pada tahun 2020, KPPN Medan I sudah mengirimkan surat undangan pertemuan sebanyak dua kali. Namun, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu pelaksana bagian bank, rencana pertemuan tersebut belum pernah terealisasi. Hal itu disebabkan oleh kurangnya respon Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

## **B. Permasalahan yang Dihadapi SMA ST. Ignasius Medan**

SMA ST. Ignasius juga mengalami kendala dalam melakukan pengelolaan Dana BOS Kinerja. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Bendahara sekolah SMA ST. Ignasius, tidak terdapat permasalahan yang berarti bagi sekolah dalam mengelola penggunaan Dana BOS Kinerja. Namun, sekolah mengalami sedikit kesulitan dalam menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS Kinerja dalam aplikasi SIRUP BOS 2020. Hal tersebut diakibatkan oleh aplikasi pelaporan yang selalu berganti setiap tahunnya serta kurangnya penjelasan dan rincian pengoperasian aplikasi tersebut.

Berdasarkan informasi yang diterima dari narasumber, sekolah-sekolah penerima Dana BOS Kinerja hanya diberikan petunjuk teknis cara pemakaian aplikasi SIRUP BOS 2020. Tidak ada pelatihan pengoperasian aplikasi SIRUP BOS 2020 oleh Dinas Pendidikan. Oleh karena itu, Bendahara SMA ST. Ignasius harus mempelajari aplikasi tersebut secara otodidak yang menyebabkan keterbatasan pemahaman terlebih sekolah yang menerima Dana BOS Kinerja di Kota Medan tidak banyak sehingga ketika mengalami kendala, narasumber tidak tahu harus bertanya atau berkonsultasi kepada siapa. Adapun pernyataan dari narasumber adalah sebagai berikut.

*"Kalau kendala untuk mengelola sih tidak ada, tetapi dalam menyusun laporan nya ada. Karena aplikasi dari dinas yang berganti-ganti tiap tahun, jadi secara pribadi saya belajar otodidak, pelatihan juga tidak pernah ada. Memang sih ada juknis cara pemakaian dari aplikasi, tapi kan tidak selamanya memahami."*

## **KESIMPULAN**

Beberapa kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 2020, terjadi perubahan skema penyaluran Dana BOS. Dana BOS yang sebelumnya "singgah" di RKUD kini langsung masuk ke rekening sekolah dari RKUN melalui wewenang tambahan yang diberikan kepada DJPb dan KPPN sebagai penyalur DAK Nonfisik—Dana BOS. Perubahan skema ini menimbulkan dampak positif kepada seluruh pihak, seperti efektivitas dan efisiensi manajemen anggaran, keakuratan penyaluran, pemotongan birokrasi, dan percepatan penyelenggaraan pendidikan oleh sekolah.
2. KPPN Medan I berperan sebagai penyalur Dana BOS Kinerja dan Afiriasi untuk seluruh sekolah pada 27 Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Provinsi Sumatera pada tahun 2020. Penyaluran dilakukan setelah menerima ND-540/PK.3/2020 oleh DJPK. Atas hal tersebut, KPPN Medan I telah berhasil melakukan pendistribusian sebesar Rp87.180.000.000 atau secara persentase sebesar 99,99% untuk Dana BOS Kinerja dan Rp169.080.000.000

atau 99,97% untuk Dana BOS Afirmasi. Namun, sepanjang tahun 2020 masih terdapat sisa dana BOS Kinerja dan Afirmasi yang belum berhasil disalurkan. Hal ini kiranya dapat menjadi perhatian KPPN untuk penyaluran Dana BOS khususnya Dana BOS Kinerja dan Afirmasi pada tahun-tahun berikutnya agar dapat mencapai realisasi penyaluran sebesar 100%. Meskipun demikian, pelaksanaan pencairan Dana BOS Kinerja dan Afirmasi yang dilakukan KPPN Medan I sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut tercermin dari kesesuaian tahapan dan waktu pelaksanaan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Pada tahun 2020, sekolah swasta berhak mendapatkan alokasi Dana BOS Kinerja dan Afirmasi. SMAS ST. Ignasius menjadi salah satu penerima Dana BOS Kinerja di Kota Medan. Pengelolaan Dana BOS Kinerja yang dilakukan SMAS ST. Ignasius terdiri atas tiga tahap, yakni perencanaan, penggunaan, dan pelaporan/pertanggungjawaban. SMA ST. Ignasius menyusun RKAS, melakukan pembelian kipas angin, lemari, tangga aluminium, dan tablet, menyusun pembukuan yakni BKU; BPK; BPB; dan rekapitulasi penggunaan serta melaksanakan pelaporan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara serta pada aplikasi Dana BOS secara *online* pada laman [bos.kemendikbud.go.id](http://bos.kemendikbud.go.id). Pelaksanaan pengelolaan Dana BOS Kinerja yang dilaksanakan oleh SMA ST. Ignasius sudah berjalan dengan baik karena sesuai dengan konsep pembiayaan pendidikan dan telah mengacu pada petunjuk teknis Dana BOS Kinerja dan Afirmasi tahun 2020.
4. KPPN Medan I dan SMA ST. Ignasius mengalami kendala dalam melaksanakan pencairan Dana BOS Kinerja dan Afirmasi dan pengelolaan Dana BOS Kinerja.
  - Kendala yang dihadapi oleh KPPN Medan I dalam menyalurkan Dana BOS Afirmasi dan Kinerja adalah banyaknya data rekening yang tidak valid dan tingginya retur. Hal ini disebabkan oleh kesalahan sekolah dalam mengisi data rekening sekolah sehingga saat dana disalurkan terjadi penolakan oleh bank operasional. Dalam menekan angka retur, KPPN Medan I telah berupaya mengundang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara untuk membahas kendala yang mungkin dialami oleh sekolah, namun sampai saat ini pertemuan tersebut belum terlaksana karena kurangnya koordinasi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.
  - SMAS ST. Ignasius menghadapi kendala saat menyusun pelaporan penggunaan Dana BOS Kinerja. Hal tersebut diakibatkan oleh aplikasi pelaporan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yang berubah-ubah setiap tahunnya. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara hanya memberikan petunjuk teknis pengoperasian aplikasi tersebut yang disebarkan melalui internet. Sekolah terpaksa mempelajari cara pengoperasian aplikasi SIRUP BOS 2020 secara otodidak. Keterbatasan pemahaman inilah menyulitkan bendahara sekolah dalam melaksanakan penyusunan laporan realisasi.

## REFERENSI

- Amiini, N. S. (2016). Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas (BOS SMA) di SMA Negeri Jumapolo Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2014. *Revista CENIC. Ciencias Biológicas*, 152(3), 28.
- Armida. (2012). Sistem anggaran pendidikan. *Penelitian Pendidikan*, 13(2), 1–10.
- Arwildayanto, Lematenggo, N., & Sumar, W. T. (2017). Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 110, Issue 9).
- Ferdi, W. P. (2013). Pembiayaan Pendidikan. *Pendidikan Dan Kebudayaan*, 4(1), 565–578.
- Lane, J. E. (2000). *New Public Management*. London: Routledge.
- Lubis, M. A. (2017). Analisis Pengelolaan Dana BOS di MA Darul Hadits Hutabaringin Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal. 11(1), 92–105.
- Kadri, H. A. (2011). *Efektivitas Dan Efisiensi Pembiayaan Pendidikan*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/6by3f>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja*.
- Monita, D. F. (2019). *Pembiayaan dalam pendidikan*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/3tyvw>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Womsiwor, A., Rofingatun, S., & Allolayuk, T. (2020). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 15(1), 92-99. Retrieved from <http://ejournal.akuntansiuncen.ac.id/index.php/JurnalAkuntansiUncen/article/view/136>.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.